

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES TAHUN 2007

Yozi Aulia Rahman

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
Email: yoziaulia@gmail.com

ABSTRACT

Poverty is a serious problem, it's happened in all the world, such as Indonesia. In September 2006, BPS announced that the poverty rate in Indonesia had increased during the period February 2005 to march 2006 from 16.0 percent to 17.75 percent contrast to steady declines in the poverty rate since the crisis. Number of Poverty in Indonesia in 2006 have been reached 35,5 million people. Government of Indonesia has implemented programs to reduce poverty until village level. These programs such as IDT, PPK, BLT, etc. But, that programs just a short run programs, not long run programs. As long run program, P2KP has many programs, such as micro credits, infrastructure, and training. In Pepedan and Linggapura village implemented infrastructure programs. Its first priority programs because there many roads in that village are broken and disturbs local economic activities. BKM and KSM managed this program so that is success. Based on SWOT analysis, appropriate strategy to improve the function of P2KP is by intregrated horizontal strategy. It means, Local Government (Brebis Regency Government) must have policy strategic and must cooperation with BKM, KSM and people in village. Project evaluate (Inputs, Outputs, Outcomes, Benefits, Impact) needs to know programs running.

Keywords: *Poverty, Infrastructure Programs, policy strategic, Project Evaluate*

PENDAHULUAN

Kemiskinan menurut Suparlan (1995:11) didefinisikan sebagai standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar hidup yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong orang miskin.

Sementara itu Turner (1972:154) telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk membantu golongan miskin agar mampu menolong dirinya sendiri dengan memberdayakan diri sendiri (*self-empowerment*). Hal ini dapat dijalankan dengan kebijakan yang bersifat *partisipatori* dan *emansipatori*, artinya di dalam pengambilan keputusan yang akan digunakan sebagai kebijakan hendaknya subyek pembangunan secara imperatif perlu diikuti sertakan dalam kesetaraan.

Program penanggulangan kemiskinan sebenarnya terus dilaksanakan pemerintah mulai dari Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Kompensasi Penguangan subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM),

dan lain sebagainya. Namun program atau proyek yang telah dilaksanakan tersebut hanyalah program jangka pendek dan tidak memberikan pelatihan ketrampilan kerja yang berkelanjutan. Pemerintah seharusnya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan tujuan jangka panjang dan dapat berkelanjutan sehingga kemiskinan di Indonesia dapat dikurangi.

Model P2KP dimulai pada tahun 1999 dimana pada awalnya dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan sebagai akibat dari krisis ekonomi tahun 1997-1998. Model P2KP merupakan program jangka panjang dalam menanggulangi kemiskinan, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dari tahun ke tahun.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Pada Maret 2006 dibandingkan dengan penduduk miskin pada 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97%), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta (17,75%). Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 mencapai 33,18 juta jiwa, dengan penduduk miskin 5,9 juta jiwa

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 1997-2006

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1997	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,37	19,51	15,97
2006	14,29	24,76	39,05	13,36	21,90	17,75

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2006

tahun 2006. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 8.844.220 KK dan ada sebanyak 2.171.201 Kepala Keluarga termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tersebar di 35 Kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah (Susenas, 2006).

Kabupaten Brebes mempunyai penduduk sebanyak 1.807.475 jiwa, dengan jumlah penduduk miskin 255.365 KK. Sedangkan di Kecamatan Tonjong penduduk miskin ada sebanyak 70.762 jiwa, dengan laki-laki sebanyak 35.304 jiwa dan perempuan sebanyak 35.458 jiwa. Sedangkan kepala keluarga miskin di Kecamatan Tonjong sebanyak 8.488 KK (KMW Jawa Tengah, 2005).

Implementasi P2KP tahun 2007 di Kecamatan Tonjong dilaksanakan pada 2 kelurahan, yaitu di desa Linggapura dan desa Pepedan. Penduduk desa Linggapura berjumlah 10.400 jiwa, dengan jumlah KK 2.346 dan KK miskin sebanyak 1.082 atau sekitar 4.328 jiwa dari total seluruh penduduk desa. Desa Linggapura terbagi menjadi 11 wilayah Rukun Warga (RW) dan 41 wilayah Rukun Tetangga (RT). Sedangkan penduduk Desa Pepedan berjumlah 1.786 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 870 jiwa dan perempuan sebanyak 916 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga berjumlah 425 dan jumlah kepala keluarga miskin 170 yang tersebar di 3 wilayah RW dan 9 wilayah RT. Kondisi jalan lingkungan yang rusak dan banyaknya jumlah orang miskin di Desa Linggapura dan Desa Pepedan melatarbelakangi pelaksanaan P2KP di dua desa tersebut.

Jalan lingkungan yang rusak sangat menghambat kegiatan perekonomian warga, terutama dalam mengangkut hasil-hasil pertanian maupun

perkebunan dan menghambat akses warga menuju desa-desa disekitarnya.

LANDASAN TEORI

Kemiskinan

Mengurangi angka kemiskinan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi. Secara umum definisi kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik.

Kemiskinan menurut Suparlan (1993: 3) adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Indikator Utama Kemiskinan

Indikator utama kemiskinan adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, rendahnya layanan kesehatan, akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam,

lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, besarnya tanggungan keluarga, tata kelola pemerintahan yang buruk, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat (Sahdan, Menanggulangi Kemiskinan Desa, <http://www.jurnalekonomirakyat.com>)

Pola Kemiskinan

Kemiskinan juga memiliki pola tersendiri baik antar daerah maupun antar individu/keluarga. Menurut Sumodiningrat dalam Widodo (2006 : 298) ada beberapa pola kemiskinan diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Presistent Poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. Daerah yang mengalami kemiskinan ini pada umumnya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi.
- 2) *Cylical Poverty*, yaitu pola kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
- 3) *Seasonal Poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti yang sering menjumpai pada kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan.
- 4) *Accidental Poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadi bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Ciri-Ciri Kemiskinan

Salim (1984: 63) memberikan ciri-ciri kemiskinan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang tidak mempunyai faktor produksi sendiri (seperti tanah, modal dan keterampilan)
- 2) Tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki asset produksi dengan kekuatan sendiri
- 3) Rata-rata pendidikan mereka rendah
- 4) Sebagian besar mereka tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai buruh tani. yang tinggal di kota kebanyakan mereka yang berusia muda dan tidak memiliki keterampilan dan pendidikannya rendah.

Program yang didanai P2KP

1) Program Fisik

Program fisik meliputi pemeliharaan, perbaikan, maupun pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan yang dibutuhkan masyarakat kelurahan setempat. Beberapa jenis komponen fisik yang dapat diusulkan, misalnya perbaikan dan peningkatan jalan dan lingkungan, ruang terbuka hijau atau taman, sarana dan prasarana bagi peningkatan ekonomi masyarakat, serta program lain yang disepakati bersama, kecuali pembangunan dan perbaikan rumah ibadah.

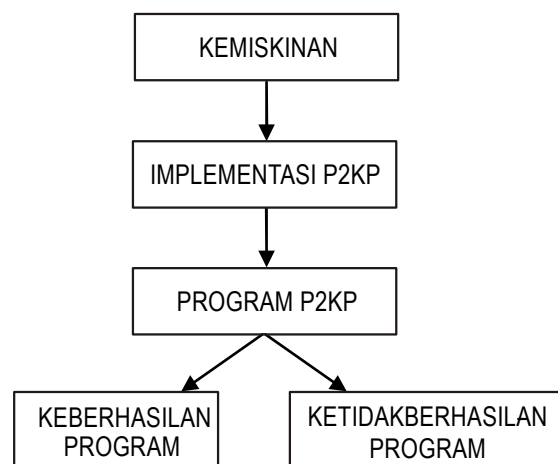
2) Program kegiatan Ekonomi Skala Kecil

Kegiatan ekonomi skala kecil meliputi kegiatan industri rumah tangga atau kegiatan usaha kecil lainnya yang dilakukan keluarga miskin yang menghimpun diri dalam KSM. Tidak ada pembatasan dalam jenis usaha dalam memperoleh kredit tambahan modal usaha mandiri, penempatan pada lembaga keuangan.

3) Komponen Pelatihan

Kegiatan pelatihan dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan warga kelurahan setempat. Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial untuk mendukung upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Kerangka Pemikiran Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga miskin yang ada di Desa Linggapura dan Desa Pepedan, yang berjumlah 1.082 kepala keluarga yang tersebar dalam 11 RW dan 41 RT untuk Desa Linggapura dan yang berjumlah 170 kepala keluarga yang tersebar dalam 3 RW dan 9 RT untuk Desa Pepedan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan metode *proporsional area random sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan wilayah masing-masing bagian yang terambil secara proporsional terambil sampelnya secara acak. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 93 KK. Dengan demikian, pengambilan sampel sebanyak 93 KK sudah dianggap representatif.

Metode Pengumpulan Data

1) Metode Kuisisioner

Menurut Arikunto (2006:193) metode kuisisioner merupakan suatu daftar pertanyaan tertulis atau angket yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Metode ini digunakan untuk mengetahui kondisi keluarga miskin di Desa Linggapura dan Desa Pepedan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

2) Metode Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:131) metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis baik berupa angka maupun keterangan (tulisan atau papan, tempat dan orang). Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui data jumlah kondisi keluarga miskin, kondisi jalan lingkungan dan jumlah BKM serta KSM.

3) Metode Wawancara

Metode wawancara adalah mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Dalam pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode wawancara kepada pihak-pihak terkait.

Validitas dan Reliabilitas

Validitas

Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006:170). Pengujian validitas menggunakan rumus korelasi *product moment* yang dikemukakan oleh Pearson, yaitu :

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Keterangan :

$$x = X - \bar{X}$$

$$y = Y - \bar{Y}$$

X = skor rata-rata dari X

Y = skor rata-rata dari Y

Berdasarkan hasil uji validitas diketahui semua butir soal valid, sehingga dapat digunakan untuk penelitian.

Reliabilitas

Perhitungan reliabilitas dalam penelitian menggunakan rumus *Alpha.*, dengan menggunakan rumus (Arikunto, 2006 : 196):

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan :

r_{11} : reliabilitas instrumen

k : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$: jumlah varians soal

σ_t^2 : varians total

Hasil perhitungan reliabilitas angket dapat diperoleh r_{11} sebesar 0.860. Hasil perhitungan r_{hitung} sebesar 0.860 dengan $n=15$ ternyata lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0.514 artinya bahwa angket penelitian reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif presentase dan Analisis SWOT. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Metode ini untuk mengetahui presentase kondisi keluarga miskin di Desa Tonjong dan Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui strategi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan peran P2KP di Kecamatan Tonjong.

Analisis SWOT juga dianalisis dalam bentuk Matriks SWOT, seperti berikut :

a) Strategi SO

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b) Strategi ST

Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

c) Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d) Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Keluarga Miskin

Kondisi keluarga miskin di Kecamatan Tonjong menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan adalah SD/SR/MI, pekerjaan tetap sebagai petani, menggarap lahan pertanian orang lain, pendapatan dari pekerjaan tetap sebesar Rp0-500.000,00 tidak mempunyai pekerjaan sampingan, pendapatan pekerjaan sampingan jika memiliki pekerjaan sampingan sebesar Rp 0-250.000,00 mempunyai tanggungan lebih dari 4 orang, tingkat konsumsi Rp500.000,00-1.000.000,00 per bulan, jumlah tabungan Rp 0-100.000,00 berobat ke Puskesmas jika menderita sakit, memiliki rumah sendiri, berjenis tempat tinggal permanen, menggunakan sumur dan, menggunakan minyak tanah.

Kondisi keluarga miskin tersebut sesuai dengan indikator kemiskinan. Pola kemiskinan di kecamatan Tonjong adalah *seasonal poverty*, hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat miskin bekerja sebagai petani sehingga kondisi keluarga bergantung pada hasil pertanian, sedangkan jenis kemiskinan di Kecamatan Tonjong adalah kemiskinan alamiah, hal ini disebabkan karena rendahnya sumber daya yang ada, dalam hal ini rendahnya kepemilikan lahan pertanian sehingga masyarakat miskin hanya bisa menggarap lahan orang lain.

Implementasi P2KP

Program Infrastruktur

Implementasi P2KP tahun 2007 merupakan implementasi yang pertama kalinya di Kecamatan Tonjong, bahkan yang pertama kali di Kabupaten Brebes. Implementasi P2KP berjalan dengan lancar, Pelaksanaan implementasi P2KP di Kecamatan Tonjong dilaksanakan di dua desa, yaitu Desa Linggapura dan Desa Pepedan. Pelaksanaan di tingkat desa dilakukan sepenuhnya oleh BKM dengan dibantu KSM. Pelaksanaan kegiatan lingkungan (fisik) dilakukan dengan mengadakan program pavingisasi dan program beton jalan .

Tujuan dilaksanakan program ini untuk membangun jalan desa baru dan memperbaiki jalan desa yang mengalami kerusakan. Pavingisasi dilakukan untuk gang-gang desa yang sempit, sedangkan rabat beton (betonisasi) dilakukan untuk jalan desa yang lebar.

Jenis dan Proporsi Program P2KP Masing-masing Desa

Sebagian besar proporsi P2KP di Kecamatan Tonjong dititikberatkan pada kegiatan lingkungan yaitu program pavingisasi jalan dan rabat beton dengan alokasi 70% untuk desa Linggapura dan 80% untuk desa pepedan. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi seperti pinjaman modal bergulir sangat minim yaitu 18% untuk desa Linggapura dan 8% untuk desa pepedan. Hal ini dikarenakan, kondisi jalan kampung di dua desa sangat parah, bahkan belum ada yang mendapatkan akses jalan sehingga Implementasi P2KP yang pertama kalinya dilaksa-

nakan di Kecamatan Tonjong menitikberatkan pada bidang fisik.

Dana yang dikucurkan

Dana yang dialokasikan untuk program infrastruktur di Kecamatan Tonjong sebesar Rp125.000.000,00 dengan rincian untuk desa linggapura sebesar Rp87.500.000,00 dan Desa Pepedan sebesar Rp37.500.000,00. Dana tersebut akan diimplementasikan secara merata ke seluruh RT yang terdapat di kedua desa, untuk Desa Linggapura sebanyak 41 RT dan Desa Pepedan sebanyak 9 RT, sehingga masing-masing RT dapat merasakan manfaat dari program pavingisasi dan rabat beton tersebut.

Tahapan Penyaluran Dana

Penyaluran dana P2KP di Kecamatan Tonjong dilaksanakan dalam 3 tahap. Lebih rinci mengenai tahapan penyaluran dana P2KP dapat dilihat pada Tabel ini:

Tabel 2. Tahapan Penyaluran Dana P2KP Kecamatan Tonjong

Desa	Tahapan Pembayaran	Sumber Dana	Total Dana
Linggapura	Tahap 1	APBN	17.500.000
	Tahap 1+2+3	APBD	87.500.000
	Tahap 2	APBN	43.750.000
	Tahap 3	APBN	26.250.000
Pepedan	Tahap 1	APBN	7.500.000
	Tahap 1+2+3	APBD	37.500.000
	Tahap 2	APBN	18.750.000
	Tahap 3	APBN	11.250.000

Sumber: Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan BLM BKM (2007)

Tabel 2 menunjukkan bahwa masing-masing tahap memiliki dana yang berbeda-beda dan sumber dana mana yang digunakan. Dapat dilihat bahwa penyaluran dana P2KP dari dana APBN dibagi dalam 3 tahap, sama halnya dengan penyaluran dana dari APBD. Namun, dana dari APBD langsung dibayarkan dan mencakup 3 tahap sehingga proses penyaluran dana dapat lebih cepat terealisasi.

Realisasi Penyaluran Dana

Penyaluran dana tersebut yang rencananya dibayarkan dalam 3 tahap, hanya baru terealisasi 1

tahap yaitu tahap 2. Sesuai dengan surat perjanjian penyaluran bantuan BLM BKM antara PJOK dan BKM disebutkan bahwa penyaluran dana tahap 1 sebesar Rp17.500.000,00 dari pos APBN belum cair, sehingga langsung disalurkan dana tahap sebesar Rp87.500.000,00 dari pos APBD Kabupaten Brebes.

Dana tahap 2 yang sudah terealisasi dari APBD Kabupaten Brebes digunakan untuk melaksanakan program kegiatan lingkungan (fisik), misalkan untuk melaksanakan pavingisasi dan rabat beton (betonisasi) jalan desa. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam surat perjanjian bantuan BLM BKM bahwa sebagian besar dana digunakan untuk melaksanakan kegiatan lingkungan fisik, untuk Desa Linggapura sebanyak 70%, dan Desa Pepedan sebanyak 80%.

Sasaran program yang telah tercapai

Pelaksanaan program pavingisasi dan rabat beton di Desa Linggapura berjalan dengan sukses dan lancar. Pelaksanaan program P2KP tersebut merata di setiap RT yang ada di Desa Linggapura. Penyaluran dana pun dibagi rata untuk setiap RT disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RT ditambah dengan swadaya masyarakat dalam bentuk bantuan berupa semen, pasir dan juga bantuan dalam bentuk tenaga.

Pelaksanaan program pavingisasi di Desa Pepedan juga berjalan dengan sukses dan cukup lancar. Namun, dari 9 RT yang semula direncanakan, baru 6 RT yang telah mendapatkan bantuan dana, sisanya akan diberikan bantuan dari dana tahap 1 APBN yang belum terealisasi. Baru RT 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang telah mendapatkan bantuan, sedangkan RT 2, 8, dan 9 belum mendapatkan bantuan dana. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program pavingisasi tersebut bervariasi, ada yang bisa satu bulan, satu minggu, bahkan satu malam. Hal ini tergantung dari panjang atau pendeknya jarak yang jalan dibangun dan banyak atau sedikitnya masyarakat yang berpartisipasi dalam menyelesaikan program tersebut. Dengan relatif cepatnya program pavingisasi dan rabat beton tersebut sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari.

Tingkat Keberhasilan

Penilaian Warga Miskin

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa warga miskin yang menilai implementasi P2KP berhasil sebesar 96,77%, sedangkan warga yang menilai tidak berhasil sebesar 3,23%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga menilai implementasi P2KP berhasil (96,77%). Ada beberapa alasan yaitu tingkat implementasi yang hampir merata di seluruh RW, pelaksanaan program yang begitu cepat sehingga bisa langsung dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat terutama masyarakat miskin dan meningkatkan perekonomian desa.

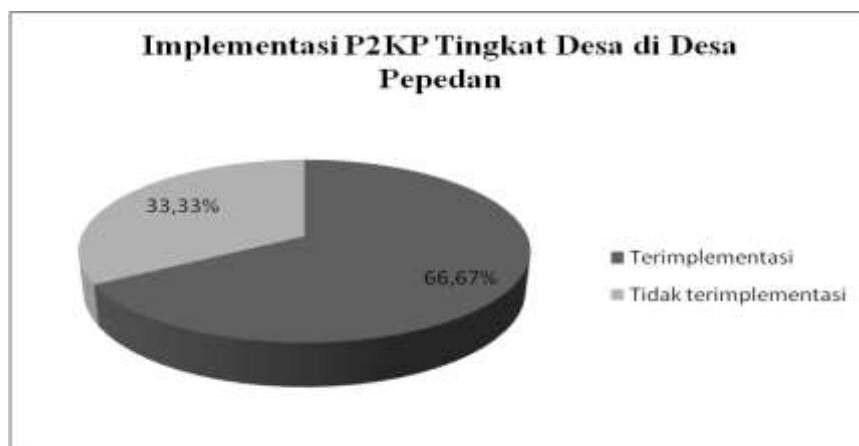
Tingkat Implementasi Program

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa untuk desa Linggapura yang terimplementasi sebanyak 100% dan tidak terimplementasi sebanyak 0%, hal ini menunjukkan tingkat implementasi di Desa Linggapura sangat tinggi, sedangkan Desa Pepedan tingkat implementasi tinggi sebesar 66,67%. Untuk lebih jelas, dapat dilihat gambar 1 dan 2 diagram dibawah ini.



Keterangan : Terimplementasi = 100%; Tidak terimplementasi = 0%

Gambar 1. Diagram Implementasi P2KP tingkat desa di Desa Linggapura



Keterangan : Terimplementasi = 66,67%; Tidak terimplementasi = 33,33%

Gambar 2. Diagram Implementasi P2KP tingkat desa di Desa Pepedan

Analisis SWOT

Matriks Internal & Eksternal

Tabel 3. Faktor-faktor Strategi Internal

Faktor-faktor Strategi internal	Bobot	Rating	Skor	Komentar
Kekuatan				
1. Akses transportasi antar desa semakin lancar	0,20	4	0,80	Ditingkatkan sarana transportasi
2. Lebih hemat dan mudah dalam mengangkut hasil-hasil pertanian ke pasar.	0,20	4	0,80	Meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Lebih efisien sehingga pengeluaran masyarakat untuk transportasi dapat dikurangi.	0,15	4	0,60	Mengurangi pengeluaran masyarakat Meningkatkan mobilitas penduduk
4. Jarak tempuh antar desa semakin singkat.	0,10	3	0,30	Meningkatkan peran aktif masyarakat
5. Meningkatkan gotong warga antar warga	0,10	3	0,30	dalam pembangunan
Kelemahan				
1. Tidak adanya bantuan dana untuk perawatan jalan.	0,05	2	0,10	Penambahan dana program
2. Dana swadaya masyarakat sangat besar	0,03	2	0,06	Penambahan dana program
3. Intensitas penggunaan jalan yang terlalu sering dapat membuat jalan menjadi rapuh	0,02	1	0,02	Perawatan jalan untuk menghindari jalan
4. Sebagian kecil warga masih tidak mau membuka diri dengan dunia luar	0,02	1	0,02	Merubah pola pikir masyarakat
TOTAL	1,00		3,00	

Sumber: Data penelitian diolah (2008).

Tabel 4. Faktor-faktor Strategi Eksternal

Faktor-faktor Strategi eksternal	Bobot	Rating	Skor	Komentar
Peluang				
1. Menggerakkan perekonomian antar desa	0,20	4	0,80	Peningkatan program keswadayaan masyarakat
2. Harga tanah dan lahan pertanian menjadi mahal karena dapat dilalui kendaraan.	0,20	3	0,60	Peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan
3. Akses informasi dari luar dapat mudah diketahui	0,15	2	0,45	Membuka hubungan dengan dunia luar
4. Mobilitas Masyarakat meningkat	0,15	3	0,45	Penguatan kegiatan ekonomi masyarakat
Ancaman				
1. Persaingan bisnis antar desa menjadi tidak sehat.	0,10	2	0,20	Pembinaan masyarakat desa
2. Konflik antar desa dapat terjadi karena semakin terbukanya akses antar desa.	0,10	2	0,20	Ciptakan situasi kondusif Pembinaan masyarakat desa
3. Kriminalitas meningkat	0,05	1	0,10	
4. Transfer perilaku yang buruk dari masyarakat desa lain	0,05	1	0,10	
TOTAL			2,90	

Sumber: Data penelitian diolah (2008)

Dari total skor yang diperoleh, yaitu faktor strategis Internal 3,00 dan faktor strategis eksternal 2,9 menunjukkan titik koordinat terletak pada daerah pertumbuhan V (Strategi konsentrasi melalui inte-

grasi horizontal) dalam kasus ini berarti strategi pemecahan masalah harus melalui integrasi horizontal.

Tabel 5. Analisis Matriks SWOT

IFAS EFAS	STRENGTH (S)	WEAKNESSES (W)
	1. Akses transportasi antar desa semakin lancar 2. Jarak tempuh antar desa semakin singkat 3. Lebih efisien sehingga pengeluaran masyarakat untuk transportasi dapat dikurangi. 4. Lebih mudah dalam mengangkut hasil-hasil pertanian ke pasar.	1. Tidak adanya bantuan dana untuk perawatan jalan sehingga dalam beberapa waktu 2. Intensitas penggunaan jalan yang terlalu sering dapat membuat jalan menjadi rapuh 3. Sebagian kecil warga masih tidak mau membuka diri dengan dunia luar. 4. Dana swadaya masyarakat terlalu besar karena dana dibagi rata per RT.
OPPORTUNITY (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
1. Menggerakkan roda perekonomian antar desa 2. Akses informasi dari luar dapat mudah diketahui 3. Harga tanah dan lahan pertanian menjadi mahal karena dapat dilalui kendaraan. 4. Tingkat mobilitas penduduk yang semakin meningkat	1. Meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat untuk mengembangkan perekonomian desa 2. meningkatkan sarana transportasi antar desa	1. Penambahan dana untuk perawatan jalan sebagai program jangka panjang untuk menggerakkan roda ekonomi desa 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat membuka diri dengan dunia luar
TREATH (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Persaingan antar bisnis desa menjadi tidak sehat 2. Konflik antar desa dapat terjadi karena terbukanya akses antar desa	1. Penguatan pola pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial 2. Peningkatan stabilitas keamanan masyarakat	1. Meningkatkan program keswadayaan masyarakat untuk mendukung perekonomian rakyat 2. Menciptakan situasi kondusif di lingkungan masyarakat

Sumber: Data penelitian diolah (2008)

Formula dan strategi

Dalam analisis internal-eksternal matriks, strategi yang dibutuhkan untuk meningkatkan peran P2KP di Kecamatan Tonjong adalah dengan strategi integrasi horizontal. Artinya Pemerintah Kabupaten Brebes harus lebih melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk secara bersama-sama menggerakkan perekonomian desa sehingga peran P2KP dapat ditingkatkan dan harus memperluas program pembangunan jalan di desa lain di Kecamatan Tonjong yang belum mendapatkan dana bantuan P2KP.

Berdasarkan analisis matriks SWOT, maka dapat diajukan beberapa strategi untuk meningkatkan peran P2KP di Kecamatan Tonjong:

- 1) Meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat untuk mengembangkan perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan sarana transportasi antar desa
- 3) Penambahan dana guna perawatan jalan sebagai program jangka panjang untuk menggerakkan roda perekonomian desa.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat setempat untuk dapat membuka diri dengan dunia luar dan masyarakat sekitarnya.
- 5) Penguatan pola pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial
- 6) Peningkatan stabilitas keamanan masyarakat.
- 7) Meningkatkan program keswadayaan masyarakat untuk mendukung perekonomian rakyat.

Tabel 6. Penilaian Proyek Infrastruktur P2KP

Dimensi	Indikator
<i>Inputs</i>	<p><i>Primer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Material (Pasir, Semen, Paving blok, dll) - Anggaran program infrastruktur (Dana Program dan pelatihan) <p><i>Sekunder :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - BKM dan KSM yang bertugas sebagai pengelola program. - Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program. - FGD (<i>Forum Group Discussions</i>) antara pengelola program dengan masyarakat.
<i>Outputs</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah desa yang mendapat program - Jumlah anggota KSM yang berperan aktif dalam pelaksanaan program - Jumlah RT dan RW yang menerima program.
<i>Outcomes</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan program. - Pembuatan jalan baru di berbagai wilayah desa. - Perbaikan jalan lama di berbagai wilayah desa.
<i>Benefits</i>	<p><i>Direct</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses transportasi antar desa semakin lancar - Jarak tempuh antar desa semakin singkat - Lebih efisien sehingga pengeluaran masyarakat untuk transportasi dapat dikurangi. - Lebih mudah dalam mengangkut hasil-hasil pertanian ke pasar. <p><i>Indirect</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Harga tanah dan lahan pertanian menjadi mahal karena dapat dilalui kendaraan. - Pendapatan masyarakat bisa bertambah, dengan adanya jalan pengeluaran untuk transportasi dapat dikurangi
<i>Impacts</i>	<p><i>Positive</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkembang aktivitas perekonomian masyarakat - Menggerakkan roda perekonomian antar desa - Akses informasi dari luar dapat mudah diketahui - Kelangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. <p><i>Negative</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Persaingan antar bisnis desa menjadi tidak sehat - Konflik antar desa dapat terjadi karena terbukanya akses antar desa

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dari Implementasi P2KP tahun 2007 di Kecamatan Tonjong berjalan dengan lancar, implementasi ini dilaksanakan di dua desa, yaitu Desa Linggapura dan Desa Pepedan. Dalam realisasi di lapangan, yang baru keluar hanya dana dari APBD sebesar Rp125.000.000,00 untuk Desa Linggapura sebesar Rp87.500.000,00 dan Desa Pepedan sebesar Rp37.500.000,00 sehingga implementasi P2KP baru difokuskan pada kegiatan infrastruktur desa, yaitu pavingisasi dan rabat beton

jalan desa. Berdasarkan analisis matriks SWOT, strategi yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan peran P2KP di Kecamatan adalah strategi integrasi horizontal, artinya Pemerintah Kabupaten Brebes bekerjasama dengan PJOK Kecamatan, BKM dan Faskel harus melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk secara bersama-sama menggerakkan perekonomian desa sehingga peran P2KP dapat ditingkatkan dan harus memperluas program pembangunan jalan di desa lain di Kecamatan Tonjong yang belum mendapatkan dana bantuan P2KP.

Saran

Saran bagi Pemerintah daerah, pelaksanaan P2KP hendaknya lebih ditingkatkan terutama masalah alokasi dana, bagi BKM untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan P2KP, maka BKM harus lebih meningkatkan kinerjanya sesuai dengan pedoman pelaksanaan P2KP, Bagi keluarga miskin, dapat mempergunakan sebaik-baiknya fasilitas jalan yang untuk dapat menggerakkan roda perekonomian agar pendapatan masyarakat dapat meningkat dan dapat keluar dari jeratan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek", Jakarta : Rineka Cipta.
- Rangkuty, Fredy, 2006, "Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis", Gramedia.Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, 1993, "Kemiskinan di Perkotaan", Yayasan Obor Jakarta
- Sahdan, Gregorius, 2005, *Menanggulangi Kemiskinan Desa*, dalam "Jurnal Ekonomi Rakyat", [http:// www.jurnalekonomirakyat.com](http://www.jurnalekonomirakyat.com).
- Turner J., 1972, *Housing issues and the Standar Problems*, "Ekistic, Vol.33, No.196. halaman 154".